

**INSPEKTORAT KOTA JAMBI**



**PERUBAHAN  
RENCANA KERJA  
(RENJA) TAHUN 2023**

**INSPEKTORAT KOTA JAMBI**



**Jln. Kapten A. Zaidi Saleh Kota Baru Jambi-36128**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Dokumen Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Dokumen Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Untuk meningkatkan daya guna laporan dan peningkatan kinerja, Inspektorat Kota Jambi secara bertahap berupaya untuk mengembangkan kualitas implementasi pelaporan kinerja dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Dengan telah disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya Inspektorat Kota Jambi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kerjanya.

Jambi, Agustus 2023



**YUNITA INDRAWATI, AP, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740607 199403 2 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 .....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .....	14
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ....	17
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Kota Jambi.....	17
BAB IV PENUTUP .....	32

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.....	5
Tabel 2.2	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah...	7
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Jambi.....	11
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	15
Tabel 3.1	Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan .....	18
Tabel 3.2	Tujuan Inspektorat Kota Jambi .....	19
Tabel 3.3	Sasaran Inspektorat Kota Jambi.....	19
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi.....	19
Tabel 3.5	Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan.....	20
Tabel 3.6	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 .....	26

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Kota Jambi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi, dimana Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi dalam bidang pengawasan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi pada dasarnya merupakan hasil proses pemikiran yang strategis untuk menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat tentang perlunya pengawasan yang menyeluruh untuk lebih menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Inspektorat Kota Jambi.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD Kota Jambi yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Jambi.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018 - 2023;
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Jambi serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat untuk dimasukkan dalam dokumen KUPA-PPAS Tahun 2023 yang nantinya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 adalah untuk:

1. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024.

2. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Inspektorat Kota Jambi.
3. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP



# BAB

# II

## HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Inspektorat Kota Jambi pada Tahun 2023 telah melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan anggaran Rp 13.263.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah). Berikut realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2023.

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023 Rp.	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN Rp.
			Rp.	%	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11,171,709,900</b>	<b>4,519,015,847</b>	<b>40.45</b>	<b>6,652,694,053</b>
	<b>1</b> <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2,497,500</b>	<b>729,900</b>	<b>29.23</b>	<b>1,767,600</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,248,750	729,900	58.45	518,850
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,248,750	-	0.00	1,248,750
	<b>2</b> <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8,928,280,877</b>	<b>3,566,970,390</b>	<b>39.95</b>	<b>5,361,310,487</b>
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,768,824,877	3,504,444,390	39.96	5,264,380,487
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	159,456,000	62,526,000	39.21	96,930,000
	<b>3</b> <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>14,400,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>41.67</b>	<b>8,400,000</b>
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14,400,000	6,000,000	41.67	8,400,000
	<b>4</b> <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>291,090,750</b>	<b>4,575,000</b>	<b>1.57</b>	<b>286,515,750</b>
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	232,710,000	-	0.00	232,710,000
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	58,380,750	4,575,000	7.84	53,805,750
	<b>5</b> <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>684,741,568</b>	<b>212,675,890</b>	<b>31.06</b>	<b>472,065,678</b>
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,050,137	-	0.00	15,050,137
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124,068,938	81,881,050	66.00	42,187,888
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,125,163	7,751,500	51.25	7,373,663
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77,997,480	21,210,000	27.19	56,787,480
	5 Fasilitas Kunjungan Tamu	92,740,500	16,202,500	17.47	76,538,000
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	359,759,350	85,630,840	23.80	274,128,510
	<b>6</b> <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>586,550,805</b>	<b>471,710,000</b>	<b>80.42</b>	<b>114,840,805</b>
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	441,094,997	421,200,000	95.49	19,894,997
	2 Pengadaan Mebel	15,136,360	15,100,000	99.76	36,360
	3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130,319,448	35,410,000	27.17	94,909,448
	<b>7</b> <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>341,298,400</b>	<b>149,429,438</b>	<b>43.78</b>	<b>191,868,962</b>
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,900,000	4,000,000	81.63	900,000
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128,200,000	58,446,838	45.59	69,753,162
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	208,198,400	86,982,600	41.78	121,215,800
	<b>8</b> <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>322,850,000</b>	<b>106,925,229</b>	<b>33.12</b>	<b>215,924,771</b>
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	284,400,000	97,840,229	34.40	186,559,771
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38,450,000	9,085,000	23.63	29,365,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023 Rp.	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN Rp.
			Rp.	%	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>1,274,790,100</b>	<b>269,520,000</b>	<b>21.14</b>	<b>1,005,270,100</b>
	<b>1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>1,090,790,100</b>	<b>226,120,000</b>	<b>20.73</b>	<b>864,670,100</b>
	1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	320,000,000	91,025,000	28.45	228,975,000
	2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	320,000,000	74,950,000	23.42	245,050,000
	3 Reviu Laporan Kinerja	38,000,000	21,500,000	56.58	16,500,000
	4 Reviu Laporan Keuangan	38,000,000	37,325,000	98.22	675,000
	5 Kerjasama Pengawasan Internal	109,790,100	1,320,000	1.20	108,470,100
	6 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	265,000,000	-	0.00	265,000,000
	<b>2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>184,000,000</b>	<b>43,400,000</b>	<b>23.59</b>	<b>140,600,000</b>
	1 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	184,000,000	43,400,000	23.59	140,600,000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>816,500,000</b>	<b>28,675,000</b>	<b>3.51</b>	<b>787,825,000</b>
	<b>1 Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>816,500,000</b>	<b>28,675,000</b>	<b>3.51</b>	<b>787,825,000</b>
	1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	478,500,000	28,675,000	5.99	449,825,000
	2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokras	130,000,000	-	0.00	130,000,000
	3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	132,000,000	-	0.00	132,000,000
	4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	76,000,000	-	0.00	76,000,000
<b>J U M L A H</b>		<b>13,263,000,000</b>	<b>4,817,210,847</b>	<b>36.32</b>	<b>8,445,789,153</b>

Hingga triwulan II tahun 2023, tingkat realisasi keuangan sebesar 36,32%. Berikut adalah tabel hasil evaluasi rencana kerja sampai dengan triwulan II tahun 2023.

**Tabel 2.2**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah**  
**Renja Inspektorat Kota Jambi**  
**Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD :

Sasaran RPJMD	Indikator	Target Kinerja
Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK	Nilai SAKIP	BB
	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,972

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Unit (Bidang) PD Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II					III					IV			
										8		9		10		11			12		13 = 6 + 12			14 = 13/5 x 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100%	15													
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Level Kapabilitas APIP - Nilai Area Sistem Manajemen SDM dan Penguatan Akuntabilitas (Hasil Penilaian Inspektorat)	-LEVEL 3 - 3,45	11.139.849.900	-LEVEL 3 -3,45	17.436.585.223	-LEVEL 3 -3,45	11.171.709.900	1.068.919.320	3.450.096.527					4.519.015.847	-LEVEL 3	21.955.601.070		197,09%							
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD (Hasil Penilaian Inspektorat)	84,50	2.497.500	BB	-	84,5	2.497.500	729.900	0					729.900	0	729.900		29,23%							
a		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1.248.750	2 Dokumen	-	2 Dokumen	1.248.750	2 Dokumen	729.900	0				2 Dokumen	6 Dokumen	0		0,00%	Subbagian Perencanaan						
b		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	1.248.750	2 Laporan	-	2 Laporan	1.248.750	1 Laporan	0	0				1 Laporan	4 Laporan	0		0,00%	Subbagian Perencanaan						
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	8.937.790.947	BB	13.528.046.308	100%	8.928.280.877	910.838.772	2.656.131.618					3.566.970.390		17.095.016.698		191,27%							
a		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	8.768.734.947	60 Orang	13.259.379.308	65 orang/bulan	8.768.824.877	55 orang/bulan	884.942.772	55 orang/bulan	2.619.501.618			55 orang/bulan	3.504.444.390	55 orang/bulan	16.763.823.698		191,18%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan					
b		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	169.056.000	12 Dokumen	268.667.000	12 Dokumen	159.456.000	3 Dokumen	25.896.000	3 Dokumen	36.630.000			6 Dokumen	62.526.000	4 Dokumen	331.193.000		195,91%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan					
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD Tenat Waktu	100%	14.400.000	BB	98.060.000	100%	14.400.000	2.400.000	3.600.000					6.000.000		104.060.000		722,64%							
a		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	14.400.000	12 Laporan	98.060.000	12 Laporan	14.400.000	3 Laporan	2.400.000	3 Laporan	3.600.000			6 Laporan		4 Laporan	98.060.000		680,97%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan					
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72,11	289.342.500	BB	418.344.351	72,11	291.090.750	2.700.000	1.875.000					4.575.000		422.919.351		146,17%							
a		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	65 Paket	95.458.950		0	0	0					0	65 Paket	95.458.950		#DIV/0!	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan						
b		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 orang	232.710.000		78.739.000	54 Orang	232.710.000	0	0					0		78.739.000		33,84%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan						

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Unit (Bidang) PD Penanggung Jawab					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
c		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54 orang	56.632.500	57 Orang	81.501.401	54 Orang	58.380.750			2.700.000			1.875.000								4.575.000			86.076.401		151,99%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
d		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-		162.645.000		0		0				0								0		162.645.000		#DIV/0!	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan	
5		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU</b>	<b>70%</b>	<b>647.161.981</b>	<b>BB</b>	<b>966.153.191</b>	<b>70%</b>	<b>684.741.568</b>		<b>42.859.400</b>			<b>169.816.490</b>								<b>212.675.890</b>			<b>1.178.829.081</b>		<b>182,15%</b>		
a		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	15.050.133	9 Paket	17.494.030	4 paket	15.050.137						0								0		17.494.030		116,24%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan	
b		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	77.610.785	45 Paket	146.887.359	4 paket	124.068.938	1 paket	25.919.400	1 paket	55.961.650										2 paket	81.881.050		228.768.409		294,76%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
c		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	15.252.493	20 Paket	22.024.173	4 paket	15.125.163			2 Paket	7.751.500										2 Paket	7.751.500		29.775.673		195,22%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
d		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	77.997.480	11 Paket	128.859.700	4 paket	77.997.480			2 Paket	21.210.000										2 Paket	21.210.000		150.069.700		192,40%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
e		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	101.491.740	12 Laporan	66.855.800	12 Laporan	92.740.500	3 Laporan	8.690.000	3 Laporan	7.512.500										6 Laporan	16.202.500		83.058.300		81,84%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
f		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	359.759.350	12 Laporan	584.032.129	12 Laporan	359.759.350	3 Laporan	8.250.000	3 Laporan	77.380.840										6 Laporan	85.630.840		669.662.969		186,14%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
6		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU</b>	<b>70%</b>	<b>584.878.572</b>	<b>BB</b>	<b>980.990.800</b>	<b>70%</b>	<b>586.550.805</b>		<b>0</b>				<b>471.710.000</b>								<b>471.710.000</b>			<b>1.452.700.800</b>		<b>248,38%</b>	
a		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	400.000.000		496.000.000	1 unit	441.094.997		0	1 unit	421.200.000										1 unit	421.200.000		917.200.000		229,30%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
b		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	15.136.364	3 Paket	133.090.000	10 unit	15.136.360		0	10 unit	15.100.000										10 unit	15.100.000		148.190.000		979,03%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
c		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	169.742.208	22 Unit	351.900.800	15 unit	130.319.448		0	7 unit	35.410.000										7 unit	35.410.000		387.310.800		228,16%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
7		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>341.448.400</b>	<b>BB</b>	<b>576.050.235</b>	<b>100%</b>	<b>341.298.400</b>		<b>67.869.658</b>				<b>81.559.780</b>								<b>149.429.438</b>			<b>725.479.673</b>		<b>212,47%</b>	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Unit (Bidang) PD Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
a		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	4.900.000	12 Laporan	5.618.000	12 Laporan	4.900.000	3 Laporan	4.000.000	3 Laporan	0	K	Rp	K	Rp	6 Laporan	4.000.000	K	Rp	9.618.000	K	Rp	196,29%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
b		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	128.200.000	12 Laporan	212.268.635	12 Laporan	128.200.000	3 Laporan	31.586.058	3 Laporan	26.860.780					6 Laporan	58.446.838			270.715.473			211,17%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
c		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	208.348.400	12 Laporan	358.163.600	12 Laporan	208.198.400	3 Laporan	32.283.600	3 Laporan	54.699.000					6 Laporan	86.982.600			445.146.200			213,65%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
8		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik</b>	5%	322.330.000	BB	868.940.338	5%	322.850.000	41.521.590		65.403.639						106.925.229			975.865.567			302,75%		
a		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	28 unit	283.880.000	28 Unit	427.311.038	28 Unit	284.400.000	28 Unit	39.541.590	28 Unit	58.298.639					28 Unit	97.840.229			525.151.267			184,99%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
b		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 unit	38.450.000	82 Unit	81.055.300	86 unit	38.450.000	6 unit	1.980.000	25 unit	7.105.000					31 unit	9.085.000			90.140.300			234,44%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
c		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 Unit	324.149.400		0	0		0						0	1 Unit			324.149.400			#DIV/0!	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
d		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 Unit	36.424.600		0	0		0						0	1 Unit			36.424.600			#DIV/0!	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
II		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Komponen Evaluasi Internal)</b>	6,89	1.290.350.100	643%	2.988.650.000	6,89	1.274.790.100	31.100.000		238.420.000						269.520.000			3.258.170.000			252,50%		
1		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang Bermilai Uang</b>	20%	1.102.490.100		2.641.900.000	20%	1.090.790.100	31.100.000		195.020.000						226.120.000			2.868.020.000			260,14%		
a		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 laporan	323.700.000		344.850.000	12 Laporan	320.000.000		0		91.025.000					91.025.000			435.875.000			134,65%	Irban	
b		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	154 laporan	323.700.000		1.584.650.000	154 Laporan	320.000.000	1 Laporan	5.100.000		69.850.000					74.950.000			1.659.600.000			512,70%	Irban	
c		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	40 laporan	40.500.000	40 Laporan	41.850.000	40 Laporan	38.000.000		0		21.500.000					21.500.000			63.350.000			156,42%	Irban	
d		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	40 laporan	40.500.000		77.050.000	40 Laporan	38.000.000	40 Laporan	26.000.000		11.325.000					37.325.000			114.375.000			282,41%	Irban	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Unit (Bidang) PD Penanggung Jawab										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
e		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	106.190.100		170.400.000	1 Kesepakatan	109.790.100			0			1.320.000							1.320.000			171.720.000		161,71%	Subbagian Analisis dan Evaluasi				
f		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	48 dokumen	267.900.000		423.100.000	48 dokumen	265.000.000			0			0										423.100.000		157,93%	Subbagian Analisis dan Evaluasi				
2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)	100%	187.860.000		346.750.000	70%	184.000.000			0			43.400.000										43.400.000		390.150.000		207,68%			
a		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 laporan	187.860.000	15 Laporan	346.750.000	12 Laporan	184.000.000			0			43.400.000											43.400.000		390.150.000		207,68%	lrban	
III		PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3	832.800.000	100%	853.175.000	3	816.500.000			28.675.000			0											28.675.000		881.850.000		105,89%		
1		Pendampingan dan Asistensi	Nilai Rata-Rata Indeks Reformasi Birokrasi PD (Hasil SA Inspektorat)	70	832.800.000		853.175.000	70	816.500.000			28.675.000			0												28.675.000		881.850.000		105,89%	
a		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 PD	486.500.000	Perangkat Da	573.425.000	40 Perangkat Daerah	478.500.000			40 Perang kat Daerah			28.675.000											40 Perangkat Daerah		602.100.000		123,76%	lrban	
b		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40 PD	134.400.000	Perangkat Da	156.750.000	40 Perangkat Daerah	130.000.000			0			0										40 Perangkat Daerah		156.750.000		116,63%	lrban		
c		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	24 kegiatan	133.900.000	16 Laporan	123.000.000	24 Kegiatan	132.000.000			0			0												123.000.000		91,86%	lrban		
d		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi penegakan Integritas	40 PD	78.000.000	-	-	40 Perangkat Daerah	76.000.000			0			0										40 Perangkat Daerah		0		0,00%	lrban		
<b>Jumlah</b>					<b>13.263.000.000</b>		<b>21.278.410.223</b>		<b>13.263.000.000</b>			<b>1.128.694.320</b>			<b>3.688.516.527</b>										<b>4.817.210.847</b>		<b>26.095.621.070</b>		<b>196,76%</b>			
Rata-rata capaian kinerja (%)																																
Predikat kinerja																																
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: komitmen dan kemauan pimpinan dan para pegawai																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja: kuantitas dan kualitas SDM																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:)																																

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Jambi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Penyajian tabel Hasil Analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kota Jambi dapat disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.3 (Tabel T-C 30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Jambi**

No	Indikator	Target Renstra PD (Setelah Perubahan)					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan	75%	80%	90%	100%	100%	89,53%	90,24%	95%	97%	
2	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	5,6	6	6,2	6,4	6,89	5,76	5,91	15,20	15,25	Mulai tahun 2022 terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya, nilai tersebut merupakan nilai untuk komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
3	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3	3,25	3,5	3	3	3	2,893	3,173	3	
4	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK	0	1	2	0	0	0	0	0	0	Mulai tahun 2022 sudah tidak menjadi indikator pencapaian kinerja
5	Level Kapabilitas APIP	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan gambaran umum objek pemeriksaan terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah (PD) telah dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Jambi berkenaan dengan urusan mengenai :

1. Inspektorat Kota Jambi telah bekerjasama secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada PD melalui rekomendasi dan catatan untuk ditindak lanjuti sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Kepala PD, namun hal terkait dengan pemberian pelayanan kepada Kepala PD masih rendah karena kurangnya komitmen dari masing-masing Kepala PD dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan dan menindaklanjutinya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi:
  - a. Sampai dengan saat ini aparatur pengawas belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang semakin berat dan kompleks maka diperlukan aparat pengawas yang memadai dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Dengan terpenuhinya kualitas sumber daya manusia aparat pengawas fungsional yang kompeten maka akan mampu melaksanakan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan secara profesional;
  - b. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengawasan masih sangat terbatas;
  - c. Kurangnya kesadaran perangkat daerah/objek pemeriksaan dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan intern maupun ekstern, terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tidak terlalu signifikan.



4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

a. Tantangan

Dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penekanan otonomi daerah berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan yang jauh lebih besar, ini berarti Pemerintah Kota Jambi khususnya diberi kewenangan yang luas namun bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri;

b. Peluang

Yang dimaksud dengan peluang dalam rencana strategis Inspektorat Kota Jambi adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi organisasi Inspektorat Kota Jambi. Dengan demikian peluang Inspektorat Kota Jambi dalam mencapai tujuannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang.

Semangat reformasi membawa kepada tuntutan pemberdayagunaan aparatur pemerintah agar mampu mewujudkan administrasi negara yang baik dengan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*.

2) Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global.

Aspek teknologi komunikasi dan informasi merupakan aspek yang dapat mendukung suatu proses kerja yang lebih baik dan berhasilguna. Perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini sangat pesat dan tidak dapat dihindari, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut. Walaupun saat ini Inspektorat Kota Jambi telah memiliki perangkat teknologi informasi yang cukup tetapi belum memadai, untuk itu dalam menghadapi dinamika tersebut di tahun-tahun yang akan datang

hendaknya perlu peningkatan penggunaan peralatan-peralatan yang lebih mencukupi dalam menunjang proses kegiatan Inspektorat Kota Jambi.

5. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti perumusan program/kegiatan prioritas untuk tahun depan adalah kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Internal yang transparan, akuntabel dan bebas KKN.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan sehubungan dengan perkembangan yang terjadi, terdapat perbedaan besaran pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dikarenakan perhitungan ulang demi tercapainya target kinerja sesuai dengan Renstra. Perbandingan pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kota Jambi**

**Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Jambi**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Jambi	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH, NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	B, 84,50	9.484.893.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Jambi	-LEVEL KAPABILITAS APIP -NILAI AREA SISTEM MANAJEMEN SDM DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS (HASIL PENILAIAN INSPEKTORAT)	-LEVEL 3 - 3,45	9.583.214.545	
1						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Nilai SAKIP PD (Hasil Penilaian Inspektorat)	84,50	2.497.500	
2						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	6.961.389.873	
3						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD Tepat Waktu	100%	14.400.000	
4						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Jambi	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72,11	517.510.749	
5						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU	70%	652.090.918	
6						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU	70%	771.177.105	
7						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	341.298.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
8						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik	5%	322.850.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kota Jambi	CAKUPAN PELAKSANAAN PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI SAKIP PD	100%	1.488.720.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kota Jambi	Rata-rata Nilai SAKIP PD (Komponen Evaluasi Internal)	6,89	1.322.836.280	
1						Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Jambi	Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang Bernilai Uang	20%	1.138.836.280	
2						Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Jambi	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)	100%	184.000.000	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kota Jambi	CAKUPAN PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI RB PD	100%	1.818.825.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kota Jambi	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3	398.400.000	
1						Pendampingan dan Asistensi	Kota Jambi	Nilai Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi PD (Hasil SA Inspektorat)	70	398.400.000	
<b>12.792.438.000</b>										<b>11.304.450.825</b>	

**3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Kota Jambi**

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Perubahan Renja berpedoman pada Perubahan Renstra Inspektorat Kota Jambi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Perubahan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pengawasan, dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 11 kegiatan yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang, 2 kegiatan penyelenggaraan pengawasan dan 1 kegiatan pendampingan dan asistensi.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebesar Rp11.304.450.825,00 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian :

- a. Rp9.583.214.545,00 untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- b. Rp1.322.836.280,00 untuk program penyelenggaraan pengawasan.
- c. Rp398.400.000,00 untuk program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

Adapun sasaran Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 dan program/kegiatan/sub kegiatan utama pendukungnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan	Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
		Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Level Kapabilitas APIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi yang ingin dilaksanakan, dengan demikian tujuan tidak boleh lepas dari upaya pencapaian keberhasilan misi. Dengan merumuskan tujuan dimaksudkan agar upaya pencapaian misi lebih terarah dan terfokus, dalam merumuskan tujuan Inspektorat Kota Jambi yaitu ***"Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel"***. Pada umumnya tujuan-tujuan telah dirumuskan cukup jelas, selaras dengan misi, menggambarkan hasil yang akan dicapai, mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman organisasi, mengakomodasi isu strategis yang dihadapi serta mencerminkan dimana organisasi berperan. Hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.2**  
**Tujuan Inspektorat Kota Jambi**

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2023
1	Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai Area Penguatan Pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	4,87

**Tabel 3.3**  
**Sasaran Inspektorat Kota Jambi**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan	100%
		Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	6,89
		Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3
		Level Kapabilitas APIP	Level III

Disajikan pula mengenai Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi pada tabel 3.4 dibawah ini.

**Tabel 3.4**  
**Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan	100%
2	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	6,89
3	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3
4	Level Kapabilitas APIP	Level III

Adapun rekapitulasi perubahan anggaran belanja serta rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 dan prakiraan maju rencana Tahun 2024 tersaji pada tabel 3.5 dan tabel 3.6 berikut.

**Tabel 3.5**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

1	2	3	4	5	Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1	
									T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						Bertambah/ (Berkurang)
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21										
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																					
<b>6 01 INSPEKTORAT DAERAH</b>						12,676,449,195	586,550,805	0	0	13,263,000,000	10,339,023,720	965,427,105	0	0	11,304,450,825	(1.958.549.175)					
<b>6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>						10,585,159,095	586,550,805	0	0	11,171,709,900	8,812,037,440	771,177,105	0	0	9,583,214,545	(1.588.495.355)					
<b>6 01 01 2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						2,497,500	0	0	0	2,497,500	2,497,500	0	0	0	2,497,500	0					
6	01	01	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima			1,248,750	0	0	0	1,248,750	1,248,750	0	0	0	1,248,750	0	
6	01	01	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima			1,248,750	0	0	0	1,248,750	1,248,750	0	0	0	1,248,750	0	
<b>6 01 01 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						8,928,280,877	0	0	0	8,928,280,877	6,961,389,873	0	0	0	6,961,389,873	(1.966.891.004)					
6	01	01	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima			8,768,824,877	0	0	0	8,768,824,877	6,810,263,873	0	0	0	6,810,263,873	(1.958.561.004)	
6	01	01	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima			159,456,000	0	0	0	159,456,000	151,126,000	0	0	0	151,126,000	(8.330.000)	
<b>6 01 01 2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						14,400,000	0	0	0	14,400,000	14,400,000	0	0	0	14,400,000	0					



Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
6 01 01 2 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	14,400,000	0	0	0	14,400,000	0	
<b>6 01 01 2,1</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>291,090,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291,090,750</b>	<b>517,510,749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517,510,749</b>	<b>226.419.999</b>	
6 01 01 2,1 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		232,710,000	0	0	0	0	232,710,000	420,470,000	0	0	0	420,470,000	187.760.000	
6 01 01 2,1 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		58,380,750	0	0	0	0	58,380,750	97,040,749	0	0	0	97,040,749	38.659.999	
<b>6 01 01 2,1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>684,741,568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684,741,568</b>	<b>652,090,918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652,090,918</b>	<b>(32.650.650)</b>	
6 01 01 2,1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,050,137	0	0	0	0	15,050,137	15,050,137	0	0	0	15,050,137	0	
6 01 01 2,1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		124,068,938	0	0	0	0	124,068,938	126,666,338	0	0	0	126,666,338	2.597.400	
6 01 01 2,1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		15,125,163	0	0	0	0	15,125,163	14,758,863	0	0	0	14,758,863	(366.300)	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
6 01 01 2,1 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77,997,480	0	0	0	77,997,480	80,661,480	0	0	0	80,661,480	2.664.000		
6 01 01 2,1 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		92,740,500	0	0	0	92,740,500	56,610,000	0	0	0	56,610,000	(36.130.500)		
6 01 01 2,1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		359,759,350	0	0	0	359,759,350	358,344,100	0	0	0	358,344,100	(1.415.250)		
<b>6 01 01 2,1</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>0</b>	<b>586,550,805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586,550,805</b>	<b>0</b>	<b>771,177,105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771,177,105</b>	<b>184.626.300</b>		
6 01 01 2,1 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		0	441,094,997	0	0	441,094,997	0	441,094,997	0	0	441,094,997	0		
6 01 01 2,1 5	Pengadaan Mebel (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		0	15,136,360	0	0	15,136,360	0	15,136,360	0	0	15,136,360	0		
6 01 01 2,1 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		0	130,319,448	0	0	130,319,448	0	314,945,748	0	0	314,945,748	184.626.300		
6 01 01 2,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				341,298,400	0	0	0	341,298,400	341,298,400	0	0	0	341,298,400	0		

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
				T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)							
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
6 01 01 2,1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,900,000	0	0	0	4,900,000	4,900,000	0	0	0	4,900,000	0	
6 01 01 2,1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		128,200,000	0	0	0	128,200,000	128,200,000	0	0	0	128,200,000	0	
6 01 01 2,1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		208,198,400	0	0	0	208,198,400	208,198,400	0	0	0	208,198,400	0	
<b>6 01 01 2,1</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>				<b>322,850,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322,850,000</b>	<b>322,850,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322,850,000</b>	<b>0</b>	
6 01 01 2,1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		284,400,000	0	0	0	284,400,000	284,400,000	0	0	0	284,400,000	0	
6 01 01 2,1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		38,450,000	0	0	0	38,450,000	38,450,000	0	0	0	38,450,000	0	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
				T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Setelah Perubahan)							
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
6 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>				1,274,790,100	0	0	0	1,274,790,100	1,128,586,280	194,250,000	0	0	1,322,836,280	48.046.180	
6 01 02 2	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>				1,090,790,100	0	0	0	1,090,790,100	944,586,280	194,250,000	0	0	1,138,836,280	48.046.180	
6 01 02 2 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		320,000,000	0	0	0	320,000,000	170,000,000	0	0	0	170,000,000	(150.000.000)	
6 01 02 2 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		320,000,000	0	0	0	320,000,000	290,000,000	0	0	0	290,000,000	(30.000.000)	
6 01 02 2 3	Reviu Laporan Kinerja (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		38,000,000	0	0	0	38,000,000	22,000,000	0	0	0	22,000,000	(16.000.000)	
6 01 02 2 4	Reviu Laporan Keuangan (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER			38,000,000	0	0	0	38,000,000	59,000,000	0	0	0	59,000,000	21.000.000	
6 01 02 2 6	Kerja Sama Pengawasan Internal (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		109,790,100	0	0	0	109,790,100	215,726,280	0	0	0	215,726,280	105.936.180	
6 01 02 2 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		265,000,000	0	0	0	265,000,000	187,860,000	194,250,000	0	0	382,110,000	117.110.000	
6 01 02 2	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>				184,000,000	0	0	0	184,000,000	184,000,000	0	0	0	184,000,000	0	
6 01 02 2 2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		184,000,000	0	0	0	184,000,000	184,000,000	0	0	0	184,000,000	0	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
				T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)							
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer		
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				816,500,000	0	0	0	816,500,000	398,400,000	0	0	0	398,400,000	(418.100.000)	
6 01 03 2	Pendampingan dan Asistensi				816,500,000	0	0	0	816,500,000	398,400,000	0	0	0	398,400,000	(418.100.000)	
6 01 03 2 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		478,500,000	0	0	0	478,500,000	128,400,000	0	0	0	128,400,000	(350.100.000)	
6 01 03 2 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		130,000,000	0	0	0	130,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	(30.000.000)	
6 01 03 2 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		132,000,000	0	0	0	132,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	(32.000.000)	
6 01 03 2 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Inspektorat Daerah)	PENDAPATAN TRANSFER	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		76,000,000	0	0	0	76,000,000	70,000,000	0	0	0	70,000,000	(6.000.000)	

**Tabel 3.6**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6	1		INSPEKTORAT DAERAH				13,263,000,000	13,263,000,000	11,304,450,825		15,053,375,791		
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	On Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	11,139,849,900	11,171,709,900	9,213,160,725	100 Persen	12,011,888,791		
6	1	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2,497,500	2,497,500	2,497,500	100 Persen	2,497,500	
6	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1,248,750	1,248,750	1,248,750	2 Dokumen	1,248,750
6	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1,248,750	1,248,750	1,248,750	2 Laporan	1,248,750
6	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	8,937,790,947	8,928,280,877	6,969,731,702	100 Persen	9,351,535,018
6	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	8,768,734,947	8,768,824,877	6,810,275,702	65 Orang/bulan	9,182,479,018
6	1	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	169,056,000	159,456,000	159,456,000	12 Dokumen	169,056,000
6	1	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD tepat waktu	100 Persen	100 Persen	14,400,000	14,400,000	14,400,000	100 Persen	14,400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan		
6	1	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	14,400,000	14,400,000	14,400,000	12 Laporan	14,400,000
6	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	100 persen	100 persen	289,342,500	291,090,750	291,090,750	100 persen	380,000,000
6	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	82 Paket	82 Paket	0	0	0	82 Paket	70,000,000
6	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	54 Orang	232,710,000	232,710,000	232,710,000	54 Orang	250,000,000
6	1	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	54 Orang	54 Orang	56,632,500	58,380,750	58,380,750	54 Orang	60,000,000
6	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU	70 Persen	70 Persen	647,161,981	684,741,568	684,741,568	70 Persen	581,578,509
6	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	15,050,133	15,050,137	15,050,137	4 Paket	16,323,862
6	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	77,610,785	124,068,938	124,068,938	4 Paket	80,000,000
6	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	15,252,493	15,125,163	15,125,163	4 Paket	24,427,447
6	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	77,997,480	77,997,480	77,997,480	4 Paket	77,977,480

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan		
6	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	24 Laporan	101,491,740	92,740,500	92,740,500	24 Laporan	34,900,620
6	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	359,759,350	359,759,350	359,759,350	24 Laporan	347,949,100
6	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU	70 Persen	70 Persen	584,878,572	586,550,805	586,550,805	70 Persen	615,136,364
6	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	400,000,000	441,094,997	441,094,997	1 Unit	400,000,000
6	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	15,136,364	15,136,360	15,136,360	10 Unit	15,136,364
6	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	169,742,208	130,319,448	130,319,448	15 Unit	200,000,000
6	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	341,448,400	341,298,400	341,298,400	100 Persen	418,802,400
6	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	400 Laporan	4,900,000	4,900,000	4,900,000	400 Laporan	4,900,000
6	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	37 Laporan	128,200,000	128,200,000	128,200,000	37 Laporan	180,100,000
6	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	208,348,400	208,198,400	208,198,400	36 Laporan	233,802,400



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
6	1	1	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)	5 Persen	5 Persen	322,330,000	322,850,000	322,850,000	5 Persen	647,939,000	
6	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	283,880,000	284,400,000	284,400,000	28 Unit	283,880,000
6	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	86 Unit	38,450,000	38,450,000	38,450,000	86 Unit	40,050,000
6	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Bangunan	2 Bangunan	0	0	0	2 Bangunan	324,009,000
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Rata-rata Nilai Sakip Perangkat Daerah (Komponen Evaluasi INternal)	6,89 Nilai	6,89 Nilai	1,290,350,100	1,274,790,100	1,274,790,100	6,89 Nilai	1,883,662,000
6	1	2	2,01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang Bernilai Uang	20 Persen	20 Persen	1,102,490,100	1,090,790,100	1,090,790,100	20 Persen	1,617,862,000
6	1	2	2,01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	323,700,000	320,000,000	320,000,000	12 Laporan	461,000,000
6	1	2	2,01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	154 Laporan	154 Laporan	323,700,000	320,000,000	320,000,000	154 Laporan	461,000,000
6	1	2	2,01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	40 Laporan	40 Laporan	40,500,000	38,000,000	38,000,000	40 Laporan	56,550,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan		
6	1	2	2,01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	40 Laporan	40 Laporan	40,500,000	38,000,000	38,000,000	40 Laporan	56,550,000
6	1	2	2,01	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	106,190,100	109,790,100	109,790,100	1 Kesepakatan	202,962,000
6	1	2	2,01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	48 Dokumen	48 Dokumen	267,900,000	265,000,000	265,000,000	48 Dokumen	379,800,000
6	1	2	2,02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)	100 Peren	100 Peren	187,860,000	184,000,000	184,000,000	100 Peren	265,800,000
6	1	2	2,02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	12 Laporan	187,860,000	184,000,000	184,000,000	12 Laporan	265,800,000
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3 Nilai	3 Nilai	832,800,000	816,500,000	816,500,000	3 Nilai	1,157,825,000
6	1	3	2,02		Pendampingan dan Asistensi	Nilai Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70 Nilai	70 Nilai	832,800,000	816,500,000	816,500,000	70 Nilai	1,157,825,000
6	1	3	2,02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	486,500,000	478,500,000	478,500,000	40 perangkat daerah	683,025,000
6	1	3	2,02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	134,400,000	130,000,000	130,000,000	40 perangkat daerah	184,900,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan		
6	1	3	2,02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	24 Kegiatan	24 Kegiatan	133,900,000	132,000,000	132,000,000	24 Kegiatan	189,900,000
6	1	3	2,02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	78,000,000	76,000,000	76,000,000	40 perangkat daerah	100,000,000
TOTAL									13,263,000,000	13,263,000,000	11,304,450,825		15,053,375,791

## **BAB** **IV** **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp 11.304.450.825,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Anggaran Inspektorat dipergunakan untuk menunjang Tujuan dan Sasaran Inspektorat pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tertuang pada dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2018-2023 serta menunjang Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Dengan disusunnya dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2023.

**INSPEKTUR,**  
*[Signature]*  
**YUNITA INDRAWATI, AP, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740607 199403 2 002